



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 476/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN NON MANAJERIAL PADA BADAN
PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan tata laksana serta membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta perannya masing-masing secara bersih, efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik;
 - b. bahwa tim analisis jabatan dan analisis beban kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan analisis terhadap jabatan dan analisis beban kerja Jabatan Manajerial Dan Jabatan Non Manajerial pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial Dan Jabatan Non Manajerial Pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial Dan Jabatan Pelaksana Pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. jumlah kebutuhan;
 - b. peta jabatan; dan
 - c. uraian jabatan.
- KETIGA** : Jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, tercantum dalam *google drive* dengan link: <https://bit.ly/LampiranUraianJabatanBadanPengelolaPerbatasanDaerah>.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 334/KEP/HK/2022 Tentang Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat /Pegawai Pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 476/KEP/HK/2025
TANGGAL : 2 Desember 2025
TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN
MANAJERIAL DAN JABATAN NON MANAJERIAL PADA BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI, TINGKAT EFISIENSI JABATAN (EJ) DAN
PRESTASI KERJA JABATAN PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

No	Nama Jabatan	Jumlah Beban Kerja Jabatan	Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai PPPK	+/-	Kebutuhan Pegawai		EJ	PJ
							Kurang	Lebih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kepala Badan Pengelola Perbatasan	1903	1	1	0	0			1.52	A (Sangat Baik)
2	Analisis Kebijakan Ahli Madya	4356	3	0	0	-3	3 Orang		3.48	A (Sangat Baik)
3	Perencana Ahli Madya	1800	1	0	0	-1	1 Orang		1.44	A (Sangat Baik)
4	Sekretaris Badan	1782	1	1	0	0			1.43	A (Sangat Baik)
5	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Pertama	1452	1	0	0	-1	1 Orang		1.16	A (Sangat Baik)
6	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	1463	1	0	0	-1	1 Orang		1.17	A (Sangat Baik)
7	Arsiparis Ahli Muda	1703	1	0	0	-1	1 Orang		1.36	A (Sangat Baik)
8	Perencana Ahli Muda	2960	2	1	0	-1	1 Orang		2.37	A (Sangat Baik)
9	Pranata Komputer Ahli Muda	4240	3	0	0	-3	3 Orang		3.39	A (Sangat Baik)
10	Penelaah Teknis Kebijakan	8224	6	4	0	-2	2 Orang		1.64	A (Sangat Baik)
11	Pengadministrasi Perkantoran	8100	6	0	0	-6	6 Orang		6.18	A (Sangat Baik)
12	Pengolah Data Dan Informasi	1420	1	0	0	-1	1 Orang		1.14	A (Sangat Baik)
13	Penata Layanan Operasional	4050	3	0	0	-3	3 Orang		3.2	A (Sangat Baik)
14	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	1656	1	1	0	0			1.32	A (Sangat Baik)
15	Arsiparis Ahli Pertama	2800	2	0	0	-2	2 Orang		2.24	A (Sangat Baik)

No	Nama Jabatan	Jumlah Beban Kerja Jabatan	Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai PPPK	+/-	Kebutuhan Pegawai		EJ	PJ
							Kurang	Lebih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Perencana Ahli Pertama	2800	2	1	0	-1	1 Orang		2.24	A (Sangat Baik)
17	Pranata Komputer Ahli Pertama	4367	3	2	0	-1	1 Orang		1.75	A (Sangat Baik)
18	Penelaah Teknis Kebijakan	10800	8	5	0	-3	3 Orang		1.73	A (Sangat Baik)
19	Pengadministrasi Perkantoran	16200	12	2	6	-4	4 Orang		6.36	A (Sangat Baik)
20	Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Dan Fasilitasi Kerja Sama	1727	1	1	0	0			1.38	A (Sangat Baik)
21	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	2847	2	1	0	-1	1 Orang		2.28	A (Sangat Baik)
22	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2991	2	1	0	-1	1 Orang		2.39	A (Sangat Baik)
23	Perencana Ahli Pertama	2800	2	0	0	-2	2 Orang		2.24	A (Sangat Baik)
24	Perencana Ahli Muda	1392	1	0	0	-1	1 Orang		1.11	A (Sangat Baik)
25	Pranata Komputer Ahli Pertama	1510	1	1	0	0			1.21	A (Sangat Baik)
26	Pengadministrasi Perkantoran	4200	3	1	2	0			3.36	A (Sangat Baik)
27	Pengolah Data Dan Informasi	1420	1	0	0	-1	1 Orang		1.14	A (Sangat Baik)
28	Fasilitator Pemerintahan	5664	4	2	0	-2	2 Orang		2.27	A (Sangat Baik)
29	Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan	1724	1	1	0	0			1.38	A (Sangat Baik)
30	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	2847	2	1	0	-1	1 Orang		2.28	A (Sangat Baik)
31	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2991	2	2	0	0			1.2	A (Sangat Baik)
32	Perencana Ahli Pertama	2805	2	0	0	-2	2 Orang		2.24	A (Sangat Baik)

No	Nama Jabatan	Jumlah Beban Kerja Jabatan	Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai PPPK	+/-	Kebutuhan Pegawai		EJ	PJ
							Kurang	Lebih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Perencana Ahli Muda	1392	1	0	0	-1	1 Orang		1.11	A (Sangat Baik)
34	Pranata Komputer Ahli Pertama	1510	1	0	0	-1	1 Orang		1.21	A (Sangat Baik)
35	Pengadministrasi Perkantoran	2700	2	0	0	-2	2 Orang		2.08	A (Sangat Baik)
36	Pengolah Data Dan Informasi	1420	1	0	0	-1	1 Orang		1.14	A (Sangat Baik)
37	Fasilitator Pemerintahan	5664	4	3	0	-1	1 Orang		1.51	A (Sangat Baik)
38	Kepala Bidang Monitoring Dan Evaluasi	1733	1	1	0	0			1.39	A (Sangat Baik)
39	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	3087	2	1	0	-1	1 Orang		2.47	A (Sangat Baik)
40	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2991	2	2	0	0			1.2	A (Sangat Baik)
41	Perencana Ahli Pertama	2802	2	0	0	-2	2 Orang		2.24	A (Sangat Baik)
42	Perencana Ahli Muda	1392	1	0	0	-1	1 Orang		1.11	A (Sangat Baik)
43	Pranata Komputer Ahli Pertama	1510	1	0	0	-1	1 Orang		1.21	A (Sangat Baik)
44	Penelaah Teknis Kebijakan	2732	2	1	0	-1	1 Orang		2.19	A (Sangat Baik)
45	Pengadministrasi Perkantoran	2700	2	0	0	-2	2 Orang		2.06	A (Sangat Baik)
46	Pengolah Data Dan Informasi	1420	1	1	0	0			1.14	A (Sangat Baik)

No	Nama Jabatan	Jumlah Beban Kerja Jabatan	Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai PPPK	+/-	Kebutuhan Pegawai		EJ	PJ
							Kurang	Lebih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Pengolah Data Dan Informasi	1420	1	1	0	0			1.14	A (Sangat Baik)
47	Fasilitator Pemerintahan	5400	4	1	0	-3	3 Orang		4.26	A (Sangat Baik)
Jumlah		155447	109	39	8	-62	62 Orang	0 Orang		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

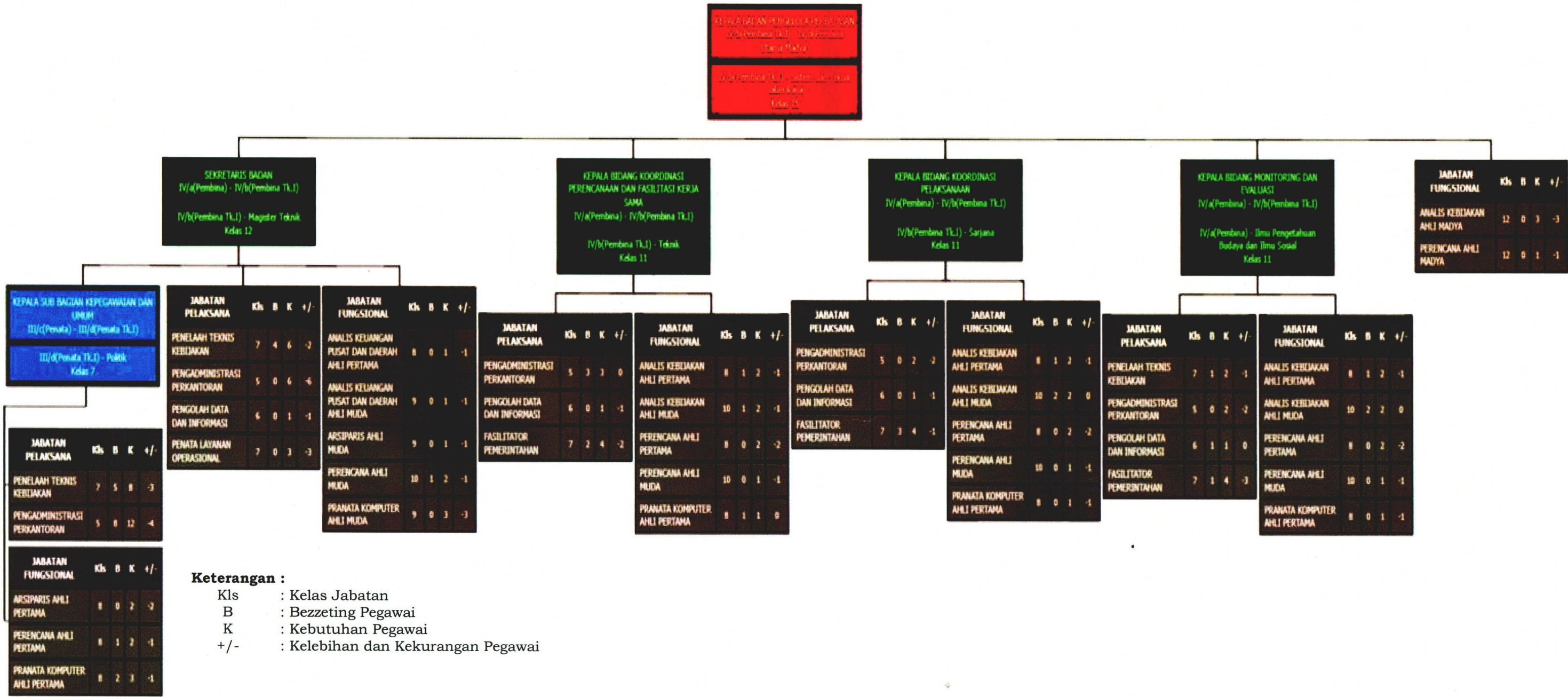
ttd

E. MELKIADES LAKA LENA





Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

PETA JABATAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Paraf Koordinasi	
Kepala Biro Organisasi	
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah	

Paraf hierarki	
Wakil Gubernur	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Biro Hukum	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


E. MELKIADES LAKA LENA